

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan pada seluruh kehidupan dan diharapkan semua warga Negara Indonesia untuk berupaya melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia. Disamping itu, pemerintah baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan seluruh jajaran organisasi pemerintah yang lain dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja karena hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap fungsi dan kedudukan aparatur pemerintah. Itu sendiri sebagai abdi Negara dan masyarakat yang dikaitkan dengan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, banyak pulau besar dan kecil yang tersebar terpisahkan oleh lautan dan tidak mungkin pemerintah pusat untuk mengatur semuanya sehingga pembangunan wawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya yang terakhir adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dibuat di era reformasi yang lebih mengutamakan kepada asas desentralisasi.¹

¹ Rozali Abdullah, SH. "Pelaksanaan Otoda dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif", PT. Rasa Grafindo Perdana, Jakarta, 2000. Hal 13-14.

Maraknya tuntutan daerah untuk diberlakukannya otonomi luas sudah sepatutnya dibicarakan, mengingat selama pemerintahan Orde Baru, pemerintah daerah hanya dijadikan objek bagi pemerintah pusat.

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemendiariannya perlu diberikan kewenangan penuh, terutama dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan kebijakan sendiri, memprioritaskan seluruh aparatur daerah agar mempunyai profesionalisme yang tinggi dan dapat memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Fenomena tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berusaha untuk menata dan mengelola aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang ada pada Kabupaten Sleman terutama dalam menangani Pertanian dan kehutanan daerah. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian merupakan pertimbangan logis untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor andalan. Selain itu pertanian dan kehutanan merupakan salah satu lapangan usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai sumbangan yang relatif cukup tinggi bagi pembentukan produk domestik regional bruto daerah. Oleh karena itu pembangunan pertanian dan kehutanan mempunyai peranan yang penting dalam pemulihan dan peningkatan ketahanan ekonomi daerah. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan sampai saat ini sistem pertanian dan kehutanan yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat berskala mikro dan kecil masih merupakan rantai terlemah dari sistem ekonomi nasional.

Karena lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan masyarakat

pertanian dan kehutanan, hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan kehutanan, tingginya jumlah masyarakat pertanian dan kehutanan yang miskin dan rendahnya nilai tambah pertanian dan kehutanan yang dinikmati masyarakat pertanian dan kehutanan².

Peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian sangatlah diperlukan, dimana arah kebijakannya diutamakan pada pemberdayaan masyarakat petani dan pemberdayaan ekonomi petani.

Sebagaimana sebuah bentuk pembangunan ekonomi maka pembangunan industri pertanian pun sebagai bagian dari sebuah gejala ekonomi bisnis memerlukan rencana yang baik bila ingin sukses dalam objek yang implisit maupun eksplisit. Pembangunan pertanian tidak akan optimal apabila pada suatu sektor hanya dipengaruhi oleh pengusaha pribadi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi dalam pembangunan ini harus ada kerjasama dari berbagai pihak.

Untuk melaksanakan rencana strategis tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman perlu memanaj atau mengatur serta mendorong seksi-seksi yang ada untuk meningkatkan kinerja dalam pembangunan pertanian daerah. Sehingga dalam pembangunan pertanian daerah, pemerintah Kabupaten Sleman harus benar-benar menyiapkan sumber daya manusia yang produktif untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal sehingga perlu adanya

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam menghadapi permasalahan seputar pembangunan pertanian.

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana implementasi strategi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kinerja organisasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai baik itu bagi sipeneliti maupun bagi pihak-pihak yang terkait.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam mengembangkan pertanian.
2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Sedangkan manfaat dari penelitian tersebut adalah ;

1. Memberikan masukan atau sebagai input bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Sebagai sumbangan ilmu, karena dalam suatu penelitian pasti terdapat hal-hal baru yang ditemui atau sesuatu yang belum pernah kita ketahui

sebelumnya, sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan dan pengalaman.

3. Akan menambah bahan bacaan atau kepustakaan baik untuk penulis sendiri maupun untuk pihak-pihak lain yang memerlukannya sebagai referensi.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proporsi yang menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³

Menurut Muchtar Mas'ud :

“ Teori adalah bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa (sesuatu) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep yang menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa”.⁴

Teori juga merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau perubahan variable dalam bidang tertentu sehinggadapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.⁵

1. Pengertian Organisasi

Untuk mengadakan pengkajian tentang kinerja suatu organisasi, pertama yang harus dipahami wadah dimana sekelompok orang berkumpul

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1989, hal.37

⁴ *Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.216

⁵ Buntoro Tjokromidjodjo, H. Prof. dan Mustoko Diningrat, DRS, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal.12

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas terdapat beberapa paradigma dan konsep tentang organisasi yang sama. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari fenomena-fenomena yang terdapat dalam organisasi sebagai pengintegrasian dari faktor-faktor perilaku dan struktural.

Dengan melihat berbagai pengertian atau definisi tentang organisasi maka ada berbagai karakteristik atau unsure dalam organisasi yaitu :

- 1) Sekelompok orang yang bekerjasama
- 2) Proses Interaksi hubungan kerja
- 3) Adanya pembagian kerja
- 4) Pencapaian tujuan

Dengan demikian organisasi akan terbentuk apabila ada sekelompok orang yang menjalin kerjasama dalam suatu proses interaksi hubungan kerja yang disertai adanya pembagian kerja untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati oleh kelompok orang tersebut.

2. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai strategi dijelaskan dalam hal 859 – 860 adalah 1. Siasat ; 2. Ilmu siasat ; 3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁷

Pengertian strategi menurut para ahli :

1. Kar Von Clausewitz

Strategi adalah suatu seni menggunakan peertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran baik dalam bisnis, politik atau strategi lainnya.⁸

2. Henry Mintzberg

Strategi merupakan serangkaian tindakan mendasar yang dibuat oleh jajaran organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu seperti : visi pokok, analisis, identifikasi alternative, peluang-peluang analisis kekuatan organisasi, dan lain-lain.⁹

3. Ricky Graffin

Strategi merupakan tulang punggung dari perencanaan dan langkah-langkah utama untuk menyelenggarakan pengarahan dan batas-batas untuk kegiatan operasionalnya, hanya saja titik berat bagi perencanaan stratei dan taktik yang digunakan.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka yang diniaksud strategi dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk mencapai sasaran khusus yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau dalam kata lain langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

⁸ A Sri Wahyuni SE,MBA "Pengantar Proses Berfikir Strategi", manajemen strategi, hal. 26

⁹ Prof Dr. Sondang P Siagian MPA, *Manajemen Strategik*, hal 16-17

¹⁰ Dr. Burhan N, *Perencanaan Strategi*, hal 8

Mengingat perumusan langkah strategis penelitian ini menggunakan model manajemen strategis, maka dalam menganalisa data digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut yang dalam hal ini dibagi dalam beberapa tahapan proses sebagai berikut ;

1. Analisis lingkungan strategis

Bryson (1995) menyatakan bahwa untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi public harus memahami lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif yang mengkaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, treats)

Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap :

- a. Sumber daya yang dimiliki (input) meliputi : SDM, dana, sarana/fasilitas, sruktural dan organisasi.
- b. Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input.
- c. Kinerja (output) yang dicapai saat ini.

Sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan-kekuatan politik, social, teknologi, fisik, dan pendidikan.

2. Perumusan strategi

Pada dasarnya strategi merupakan garis besar terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategi yang telah diidentifikasi.

Dalam perumusan strategi peningkatan kinerja digunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- b. Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif umum tersebut.
- c. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kendala-kendala.
- d. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam satu/dua tahun kedepan.
- e. Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam bulan kedepan dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

3. Kinerja Aparatur Pemerintah

a. Kinerja

Batasan kerja menurut Purwodarminto :

“Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang (karyawan atau pegawai) dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”.

Yang berarti bahwa kinerja merupakan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok ataupun individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.

Sedangkan kinerja menurut Suyadi Prawirosentono;

“Kinerja atau performansi adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika dan moral”.¹¹

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dan hasil secara optimal, baik dalam lingkungan organisasi maupun lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian dalam penelitian ini, bahwa aspek yang sangat penting yang harus selalu diperhatikan baik oleh para karyawan ataupun para pegawai pada khususnya pegawai Dinas Pertanian adalah aspek kinerja, yang mana dalam kinerja tersebut adalah merupakan tolak ukur tercapai atau tidaknya suatu perencanaan atau menjadi rencana kerja dalam suatu lembaga pemerintah maupun dalam organisasi pada umumnya.

Ada enam kriteria kinerja yang dapat dinilai :

- a. *Quality*/Kualitas, menyangkut kesesuaian antara hasil dengan keinginan.
- b. *Quantity*/Kuantitas, jumlah yang dihasilkan baik dinilai dengan uang, jumlah unit ataupun aktivitas.
- c. *Timelines*/Ketepatan waktu dalam bekerja.
- d. *Cost Effectiveness*/Efektifitas biaya menyangkut penggunaan sumber daya organisasi secara optimal.
- e. *Need for Supervision*/Kebutuhan pengawasan, menyangkut perlunya bantuan atau intervensi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- f. *Interpersonal Impact*/Dampak interpersonal, menyangkut peningkatan harga diri, hubungan baik dan kerjasama antar teman sejawat maupun atasan bawahan.¹²

Seiring dengan berjalannya kondisi global, lembaga dituntut untuk meningkatkan kemampuan SDMnya, baik keikutsertaan dalam pelatihan atau pengiriman kejenjang tertentu yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan SDM sebuah lembaga maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

Kinerja organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Responsibilitas

Aspek ini diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh para karyawan

¹² H.J Bernadin and J.S Kane, "Performance Appraisal: A Contingency Approach; to System Development and Evaluation" 2d ed. Boston, MA: DWS Kent, 1992. dalam Bernadin and Russell

atau pegawai Dinas Pertanian, Kondisi administrasi, kebijakan dan program yang baik, disini dimaksudkan dalam arti yang luas sebagai kemantapan system pekerjaan dan keahlian yang dimiliki para karyawan atau pegawai. Kondisi administrasi, kebijakan dan program disini maksudnya adalah sebagai aturan-aturan yang harus ditaati oleh aparatnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi tanggung jawab yang dimiliki aparatnya.

2. Responsivitas

Aspek ini diartikan sebagai daya tanggap para karyawan terhadap kebutuhan dan keinginan dalam rangka pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Daya tanggap disini dimaksudkan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan penerapan peraturan yang benar. Untuk mengukur responsivitas adalah dengan semakin tinggi daya tanggap karyawan atau pegawai terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat maka akan semakin baik pula kemampuan aparat dalam melayani masyarakat baik yang sifatnya material maupun immaterial.

3. Profesionalisme

Aspek ini menunjuk pada sifat suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para aparatur Dinas untuk menunjang kemantapan fungsi aparaturnya sebagai

kinpomen yang menjalankan fungsi tersebut. Profesionalisme juga dapat diukur dengan tingkat pendidikan yang diperoleh dari karyawan atau pegawainya, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula tingkat keprofesionalnya, karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimilikinya, profesionalisme akan selalu ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu keahlian dan kemampuan untuk mengoperasikan system tersebut.

4. Akuntabilitas

Aspek ini dapat diartikan sebagai suatu pertanggung jawaban dari para aparaturnya tentang apa yang telah dilakukannya terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan dengan Dinas khususnya. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas tersebut adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi serta evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang atau telah dilakukan oleh organisasi karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan kualitasnya.¹³

Untuk mencapai kinerja yang baik seharusnya para aparatur pemerintah memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya

¹³ Mosher, Frederick C, *Democracy And The Public Service*, New York, Oxford University Pres, 1968 seperti dikutip oleh Rakhadi, M. D., *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta, 1993, hal. 100.

kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya sehingga masyarakat merasa diperhatikan oleh pemimpin atau alasannya.

b. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah terdiri dari dua kata yaitu : “aparatur” dan “pemerintah”. Adapun aparatur berasal dari kata Aparat yang berarti karyawan/pegawai. Sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada badan, organ, alat perlengkapan yang menjalankan fungsi itu, mengenai istilah pemerintah dalam hal ini dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.

- a. Pemerintah dalam arti luas yaitu menunjuk pada pengaturan Negara, alat-alat perlengkapan negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya, sehingga makna aparatur adalah seluruh aparat sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti yang luas.
- b. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.¹⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah disini adalah aparatur negara atau pegawai sipil. Dalam perencanaan skripsi ini penulis membatasi pada pengertian aparatur pemerintah atau pegawai sipil dalam

¹⁴ Muband, *Teori dan Metodologi Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 100.

wilayah Dinas Pertanian dan bukan pengertian aparatur pemerintah secara menyeluruh atau dalam arti luas.

Aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁵

Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi, pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat, Pembina, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaiannya perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

4.. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah

¹⁵ Dalam Peraturan CPN tentang Aparatur Negara, PP 7 August 1994, hal. 109.

menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.¹⁶

Dalam pasal 124 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Daerah yaitu :

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

5. Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Adapun tugas dari Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah¹⁷:

¹⁶ Wikipedia Indonesia

¹⁷ Perda propinsi DIY No. 3 Tahun 2004

- a. menyusun program dan pengendalian di bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. memberikan perijinan usaha dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan pembinaan usaha dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- e. memberdayakan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

E. Definisi Konseptual

Definisi menggambarkan adanya hubungan antar konsep-konsep spesifik yang berbeda yang ingin diteliti agar penelitian ini dapat dipahami tanpa menimbulkan kekaburan maka perlu didefinisikan dengan jelas konsep-konsep tersebut :

1. Strategi

Adalah langkah-langkah (rencana yang cermat) mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Kinerja Dinas

Adalah suatu pencapaian hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dinas pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas yang telah dibebankan

kepadanya serta sebagai konsekuensi fungsi dan tanggungjawabnya sebagai komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya untuk melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan rencana dan tujuan bersama.

F. Definisi Operasional

Menurut Saifudin Anwar definisi operasional adalah bahasan atau definisi suatu variable agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukkan indikatornya yang jelas.¹⁸

Cara mengukur suatu variable dengan kata lain definisi operasional adalah indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan pertanian melalui :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Komitmen keterbukaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- 2) Kemampuan berkomunikasi petugas dengan masyarakat berjalan baik.
- 3) Koordinasi antar staff berjalan baik.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi
- 5) Tersedianya UPTD

¹⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, 2001, hal 50

b Kelemahan

- 1) Kinerja petugas belum mantap.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung kerja belum optimal.
- 3) Dana pemerintah sangat terbatas.
- 4) Beban kerja belum merata.
- 5) Pengelolaan data belum optimal.
- 6) Penghargaan dan hukuman belum konsisten.

2. Faktor Lingkungan Eksternal**a. Peluang**

- 1) Meningkatnya permintaan pasar.
- 2) Tingkat produktivitas dan kualitas produksi.
- 3) Pemberdayaan rakyat dan ekonomi rakyat.
- 4) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
- 6) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan..

b. Tantangan

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah
- 2) Banyaknya program bantuan lain.
- 3) Rendahnya minat kaum muda untuk berusaha di bidang pertanian dan kehutanan.
- 4) Kelembagaan tani yang masih lemah.
- 5) Penanganan pasca panen belum optimal
- 6) Pergeseran pemanfaatan lahan..

3. Dalam rangka mengembangkan pertanian daerah, strategi yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Dengan komitmen keterbukaan dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan pemberdayaan rakyat dan ekonomi rakyat.
 - b. Dayagunakan sumberdaya manusia yang sesuai kualifikasinya untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas produksi pertanian dan kehutanan.
 - c. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian memandu penulis tentang unsur-unsur bagaimana penelitian akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia sebagai objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran atau kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara otomatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.¹⁹

¹⁹ *Mohammed Nizar, dalam Metode Penelitian, Cengage Indonesia, Jakarta, hal 62*

2. Unit Analisis

Adapun unit analisis yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

3. Jenis data dan Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder, adapun pengertian dari kedua data tersebut adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini aparaturnya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter tentang daerah penelitian, buku-buku, surat kabar serta laporan-laporan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yang dimaksud interview adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.²⁰

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian: Studi Kasus*, Yogyakarta, 1994, hal. 114

Jadi interview merupakan teknik atau cara pengumpulan dengan jalan langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan interviewer dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Disini interview dilakukan dengan aparat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari arsip-arsip atau catatan, monografi dan laporan-laporan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

5. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini diadakan pada kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan tujuan karena penulis ingin mengetahui sejauh mana strategi yang digunakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam mengembangkan pertanian daerah dan ingin mengetahui kinerja dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Sedangkan alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sleman karena di Kabupaten Sleman memiliki lahan pertanian yang potensial untuk dikembangkan

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif menurut Koentjoroningrat adalah ;²¹

“Data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis. Mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit”.

Dengan menggunakan teknikanalisis data kualitatif maka data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis menggunakan angka-angka tetapi data yang diperoleh itu akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

²¹ Koentjoroningrat, Metode Penelitian Sosial, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 328